

KEHIDUPAN MASYARAKAT BIMA PADA KEPEMIMPINAN SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN TAHUN 1915-1951**M. Al-Qautsar Pratama**Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email : aqautsar@gamil.com**Abstrak**

Perkembangan kehidupan masyarakat Bima tidak terlepas dari berdirinya sistem kesultanan yang banyak mengubah kehidupan masyarakat Bima dari masa ke masa. Sultan-sultan yang memimpin dan memerintah di Kesultanan Bima memberikan corak dan warna yang berbeda terutama pada masa kepemimpinan Sultan Salahuddin memerintah tahun 1915-1951. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan masyarakat Bima pada kepemimpinan Sultan Salahuddin memerintah baik dari segi politik, pemerintahan, sosial-budaya, keagamaan, ekonomi dan pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode ini memiliki tahapan-tahapan tertentu diantaranya heuristik, kritik, intepretasi dan historiografi. Teori yang digunakan diantaranya teori politik, kepemimpinan, dan teori the great man. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Bima pada masa kepemimpinan Sultan Salahuddin memerintah sangat dinamis. Dalam bidang politik rakyat Bima bersama Sultan gencar melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Jepang dengan berbagai organisasi politik yang dibentuk untuk melawan cengkraman penjajah. Dalam bidang pemerintahan Sultan Salahuddin membentuk lembaga hukum berbasis hukum Islam. Dalam bidang ekonomi rakyat Bima memiliki corak kehidupan agraris dan perdagangan. Dalam bidang sosial keagamaan masyarakat Bima hidup dalam keharmonisan. Dan dalam bidang pendidikan masyarakat Bima tidak hanya mengenal pendidikan formal namun juga pendidikan berbasis agama Islam.

Kata Kunci: *Kehidupan Masyarakat, Bima, Kepemimpinan, Sultan Muhammad Salahuddin*

Abstract

The development of the life of the Bima community is inseparable from the establishment of a sultanate system that has changed the lives of many Bima people from time to time. Sultan-sultan who led and ruled in the Bima Sultanate gave different colors and colors, especially during the leadership of Sultan Salahuddin ruled in 1915-1951. This study aims to determine the life of the people of Bima in the leadership of Sultan Salahuddin governing both in terms of politics, government, social-culture, religion, economics and education. This research is a historical research, therefore this study uses historical research methods. This method has certain stages including heuristics, criticism, interpretation and historiography. The theories used include political theory, leadership, and the theory of the great man. The results of this study indicate that the life

of the people of Bima during the leadership of Sultan Salahuddin ruled very dynamically. In the political sphere of the Bima people with the Sultan incessantly resisted the Netherlands and Japan with various political organizations formed to fight the grip of the invaders. In the field of government, Sultan Salahuddin formed a legal institution based on Islamic law. In the economic field Rakyat Bima has a pattern of agrarian life and trade. In the socio-religious field, the Bima community lives in harmony. And in the field of education the Bima community not only knows formal education but also Islamic-based education.

Keywords: *Community Life, Bima, Leadership, Sultan Muhammad Salahuddin*

Pendahuluan

Kesultanan Bima merupakan salah satu wilayah yang memiliki peranan penting dalam panggung sejarah Islam khususnya di kawasan Nusa Tenggara. Jauh sebelum terjadinya proses pengislaman, Bima sudah menjadi daerah dengan perkembangan perdangan yang cukup pesat. Menurut catatan Bo Sangaji Kai¹, cikal bakal daerah Bima dirintis oleh pendatang dari Jawa yang bernama Sang Bima yang kemudian menikah dengan Putri Tasi Sari Naga. Dari pernikahan tersebut melahirkan dua orang putra yang bernama Indra Zamrud dan Indra Komala, kedua anaknya tersebutlah yang menjadi cikal bakal keturunan raja-raja Bima². Dalam catatan lainya disebutkan bahwa Ncuhi Dara dan Padolo menyampaikan keputusan pada saat Sang Bima memahat Wadu Pa'a mungkin dilakukan oleh Sang Bima yang beragama Hindu Siwaistik atau orang-orang Hindu yang hilir mudik melewati Flores kala itu. Kuat dugaan dia sedang memimpin ekspedisi yang singgah di Pulau Satonda kemudian tiba di teluk Bima. Bisa dikatakan bahwa sang Bima merupakan orang yang memiliki andil penting dalam pendirian kerajaan Bima Hindu namun raja pertama yang memimpin kerajaan Bima yakni putranya Indra Zamrud yang diasuh oleh Ncuhi Dara.

Menurut Sejarawan Bima M. Hilir Ismail, tahun 1540 M merupakan tonggak awal kedatangan Islam di tanah Bima, proses Islamisasi itu berlangsung dalam tiga tahap yaitu periode kedatangan Islam tahun 1540-1621, periode pertumbuhan Islam tahun 1621-1640 M, dan periode kerajayaan Islam 1640-1950 M. Pada awal sebelum Islam menjadi agama

¹Bo Sangaji Kai merupakan naskah kuno milik Kerajaan Bima, aslinya ditulis menggunakan aksara Bima. Naskah ini kemudian ditulis ulang pada abad ke-19 dengan menggunakan huruf Arab-Melayu, menggunakan kertas dari Belanda dan Cina.

² Abdullah Tajib, *Sejarah Dana Mbojo* (Jakarta: Harapan Massa, 1999), 11.

resmi kerajaan, ajaran Islam sudah masuk dan menyebar ke wilayah-wilayah pesisir pantai Bima³. Proses pengislaman di tanah Bima diklasifikasikan oleh Muhammad dapat terbagi dalam empat fase. Pertama, pada abad XIV masyarakat Bima telah mengetahui tentang adanya agama Islam yang dianut oleh masyarakat pulau Jawa. Kedua, pada abad itu juga, datangnya para utusan/mubalig melalui pintu perdagangan dari Jawa, khususnya dari kesultanan Demak dan Gresik, untuk menyebarkan Islam di Bima. Ketiga, adanya beberapa orang masyarakat Bima yang memeluk agama Islam. Keempat, masuknya masyarakat Bima ke dalam Islam secara massal⁴.

Pada tanggal 5 Juli 1640 M menjadi tonggak berdirinya kesultanan Bima dengan Sultan pertama Abdul Khair (La Ka'i) dan perdana menteri *La Mbila* memeluk Islam dan berganti nama menjadi Jalaludin. Bima memasuki era kesultanan yang berlandaskan Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Sebenarnya, masyarakat Bima sudah mengenal Islam melalui penyebar agama Islam dari tanah Jawa, Melayu bahkan Gujarat dan Arab pada tahun 1609 M, yang mengenal lebih dulu adalah masyarakat pesisir. Masa kesultanan merupakan masa kejayaan Bima. Bima secara politik dan ekonomi berubah menjadi salah satu daerah perdagangan paling berpengaruh di wilayah Nusa Tenggara pada awal abad ke-16. Islam di masa kesultanan bersinar cemerlang dan mencapai puncak kejayaan. Selama menjadi Kesultanan.

Sultan Muhammad Salahuddin sebagai sultan terakhir Kesultanan Bima memiliki peranan yang sangat penting dalam proses kemajuan Islam di tanah Bima. Sultan Salahuddin merupakan salah satu pemimpin yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Bima. Ia lahir di Bima pada tanggal 15 Zulhijah 1306 Hijriah atau 14 Juli 1889 dan meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1951 merupakan putra mahkota dari Sultan Ibrahim⁵. Sejak usia muda ia sudah tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu keagamaan, pendidikan, dan politik. Sultan Muhammad Salahuddin banyak belajar tentang ilmu pemerintahan dan agama dari ulama dan pejabat istana pada saat itu. Ia juga menekuni ilmu tauhid, serta siasat politik, ia selalu

³ Abdul Gani Abdullah, *Bima Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 11.

⁴ Muhammad Ahmad, "Hubungan Goa dan Aceh dalam Proses Islamisasi Kerajaan Bugis Makassar", dalam Andi Rasdianah (ed.), *Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia*, IAIN Ujung Pandang, 1982.

⁵ M. Hilir Ismail, *Raja dan Sultan Bima*, (Bima: Pemerintah Kabupaten Bima, 2014), 49.

membaca buku-buku, dan rajin mempelajari ilmu Qur'an dan Hadist. Selian mendapat bimbingan dari pala ulama setempat beliau juga berguru pada ulama yang didatangkan dari Batavia yaitu H. Hasan dan Syeh Abdul Wahab dari Mekakah⁶.

Berdasarkan faktor-faktor diatas pada tanggal 2 November 1899 beliau resmi diangkat sebagai “*Jena Teke*”⁷oleh majelis Hadat. Kemudian untuk mendapatkan pengalaman lebih jauh dalam menjalankan roda pemerintahan, maka pada tanggal 23 Maret 1908 diangkat menjadi Jeneli Donggo atau setingkat camat dalam hirarki kepemimpinan Kesultanan Bima. Setelah sang ayah Sultan Ibrahim mangkat pada tahun 1915, Muhammad Salahuddin mengambil alih kekuasaan pemerintahan kemudian tahun 1917 resmi dilantik menjadi sultan Bima ke-XVI yang memerintah dari tahun 1915-1951 M. Disamping menjadi sultan, pada tahun 1949 diangkat menjadi Dewan Raja-raja se-Pulau Sumbawa atas persetujuan Sultan Dompu dan Sultan Sumbawa. Sultan Salahuddin sangat fokus pada pembangunan dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan Islam. Pada proses menjalankan tampuk kekuasaan Sultan Muhammad Salahuddin banyak mendapatkan rintangan dan tantangan.

Perjuangan beliau dalam menghadapi tantangan dari internal dan eksternal kerajaan patut diabadikan sehingga bisa menginspirasi masyarakat Bima sekarang dan yang akan datang bagi generasi-generasi penerus terutama para remaja dan pelajar. Dari sekian banyak sultan yang memimpin di Kesultanan Bima, Muhammad Salahuddin merupakan sultan yang diabadikan sebagai nama Bandar Udara di Kabupaten Bima yang bernama Bandar Udara ‘Sultan Muhammad Salahuddin Bima’.

Pembahasan

Muhammad Salahuddin adalah tokoh yang memegang peran utama dalam perkembangan sejarah Bima pada awal abad ke-19. Setelah Sultan Ibrahim mangkat pada tanggal 16 Desember 1915, iadigantikan oleh putranya Muhammad Salahudin yang sebelumnya menjabat sebagai Tureli Donggo. Sultan Salahudin dilahirkan pada tanggal 15 Zulhijah tahun 1306 H (1888M) dan dilantik menjadi sultan pada tahun 1917. Wafat di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1951 dalam usia 64 tahun. Setelah wafat digelari *Ma*

⁶ M. H Hilir Ismail, *Raja dan Sultan Bima*, 50.

⁷Jena Teke berarti Putera Mahkota, Sultan Salahuddin meruapakan satu-satunya anak dari Sultan Ibrahim yang diangkat sebagai putera mahkota dari 11 bersaudara.

Kakidi Agama, karena beliau menjunjung tinggi dan agama dan memiliki pengetahuan luas dalam bidang agama.

Salahuddin adalah salah seorang putra Sultan Ibrahim (Sultan XIII). Dengan permaisurinya Siti Fatimah Binti Lalu Yusuf Ruma Sakuru. Lahir di Bima pada tanggal 15 Zulhijah 1306 H (14 Juli 1889), memiliki 11 orang saudara. Tiga saudara seayah seibu masing-masing bernama Abdullah (Ruma Haji), Abdul Qodim (Ruma Siso) dan Nazaruddin (Ruma Uwi), Saudara seayah terdiri dari Siti Hafsa, Abdul Azis, Sirajuddin (Ruma Lo), ibunya ketiganya bernama Siti Aminah. Kemudian Siti Aminah (Ruma Gowa) ibunya Karaeng Bonto Ramba putri Karaeng Mandalle, Siti Aisyah (ibundanya bernama Baena), Lala Ncandi (ibunya bernama Aisyah), Ahmad (ibundanya bernama Hamidah)⁸.

Mulai usia kanak-kanak telah mendapat pendidikan agama dan ilmu pemerintahan dari ulama dan pejabat istana. Sejalan dengan perkembangan umurnya, Muhammad Salahuddin menekuni ilmu tauhid, serta siasat (politik). Salahuddin sangat rajin mempelajari ilmu Qur'an dan Hadist. Selain mendapat bimbingan dari para ulama lokal, Salahuddin berguru pada ulama yang didatangkan dari Batavia yaitu H. Hasan dan Syekh Abdul Wahab dari Mekkah. Muhammad Salahuddin merupakan murid yang rajin dan cerdas serta rajin membaca. Mempunyai koleksi buku-buku bermutu karangan ulama besar seperti Imam Safei.

Koleksi buku-bukunya masih dirawat dengan baik oleh anak cucunya. Muhammad Salahuddin juga gemar menulis, salah satu buku karangannya ialah "Nurul Mubin" diterbitkan oleh percetakan Syamsiah Solosebanyak tiga kali dengan penerbitan terakhir pada tahun 1942. Berdasarkan kemuliaan akhlak dan ilmu pengetahuannya yang luas, akhirnya pada tanggal 2 November 1899, diangkat menjadi "Jena Teke" oleh majelis Hadat. Untuk menimbang pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka pada tanggal 23 Maret 1908 diangkat menjadi Jeneli Donggo setelah sang ayah Sultan Ibrahim mangkat pada tahun 1915. Muhammad Salahuddin memegang tampuh pemerintahan. Kemudian pada tahun 1917 secara resmi di lantik menjadi Sultan Bima XIV yang memerintah dari tahun 1915-1951. Disamping sebagai Sultan pada tahun 1949 diangkat menjadi pimpinan Dewan Raja-raja se-pulau Sumbawa atas persetujuan Sultan

⁸ M. Hilir Ismail, *Raja dan Sultan Bima*, 54.

Dompu, dan Sultan Sumbawa. Dalam bidang organisasi pergerakan, Salahuddin menjadi perintis, pelindung, dan ketua berbagai organisasi yang bergerak dibidang agama, sosial dan politik.⁹

Sultan Muhammad Salahuddin, seorang tokoh yang taat menjalankan perintah agama serta memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas Muhammad Salahuddin Adalah seorang tokoh nasional Islam yang jujur serta berpenampilan sederhana. Pakaian serta atribut kebesaran jarang dipakai oleh tokoh sejarah. Yang berpredikat sultan ini. Kritik yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh muda diterima dengan lapang dada. Pada masa pemerintahannya. Kesultanan Bima sedang diterpa Badai Politik dan ekonomi yang dahsyat. Pemerintah kolonial Belanda sedang mencabik-cabik harga diri dan jati diri masyarakat Mbojo. Semua tantangan dihadapinya dengan jiwa besar. Muhammad Salahuddin mempunyai keyakinan teguh, bahwa semua tantangan dapat diatasi melalui perjuangan panjang.

Situasi Politik Bima Era Kolonial Belanda

Perjalanan sejarah Kesultanan Bima tidak terlepas dari perjuangan melawan penjajah, telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa penetrasi Belanda di Bima sudah ada jauh sebelum Sultan Muhammad Salahuddin memerintah. Secara politis hubungan Bima dengan VOC mulai berlangsung dengan ditandatanganinya perjanjian 8 Desember 1669 dengan Admiral Speelman. Perjanjian ini merupakan kontrak pertama dengan VOC sebagai akibat keikutsertaan sultan Bima, Abdul Khair Sirajuddin membantu kerajaan Gowa memerangi Belanda. Karena kalah perang, Sultan Hasanudin terpaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tahun 1667, yang dikenal sebagai Perjanjian Bongaya.

Isi perjanjian itu antara lain memisahkan kerajaan Bima dengan kerajaan Gowa agar tidak saling berhubungan dan saling membantu. Dalam kontrak tahun 1669 Bima memberikan terobosan kepada kompeni untuk berdagang di Bima dan raja atau sultan tidak boleh meminta atau menarik cukai pelabuhan terhadap kapal dan barang-barang kompeni yang keluar masuk pelabuhan. Pada tahun 1938 pemerintah Hindia Belanda

⁹M Hilir Ismail, *Peran Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara* (Mataram: Lenggeng dan IKAPI Ford Foundation, 1988), 45.

secara resmi mengutus Mr. Haagman yang menjabat seorang Residen di Bima. Dengan masuknya pengaruh Belanda secara nyata di Kesultanan Bima maka merubah kehidupan politik serta pemerintahan. Pemerintah kolonial Belanda mulai membatasi sedikit demi sedikit hak sultan dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan badan hokum yang berdasarkan Hadat dan Syara yang sebelumnya dipegang teguh oleh sultan dan rakyatnya diganti dengan sistem Hindia Belanda¹⁰.

Perubahan-perubahan sangat dirasakan pada saat itu diantaranya dalam hal tugas majelis pemerintahan yang disebut Tureli yang merupakan Kabinet Kesultanan Bima yang dipimpin oleh Tureli Nggampo, oleh Belanda dibentuk anggota dewan pemerintah. Hal ini dilakukan agar kekuasaan sultan dan jajarannya hilang legalitasnya dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan.¹¹

Situasi politik akibat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Bima bertambah panas ketika pada tanggal 30 maret 1942 kedatangan dua orang Pilot Belanda yang mampir ke Bima dari perjalanan Kendari ke Australia. Kedua pilot ini membuat kekacauan ketika dengan kejam menyerang dengan cara menembaki perahu orang Jawa dan Madura yang menolak permintaan mereka untuk mengantarkan menuju Australia. Tindakan ini hanya dibiarkan saja oleh pihak kolonial¹². Pada tanggal 5 April 1942 M, para pemuda yang disokong oleh tentara KNIL dan Polisi menyerang tangsi polisi dan penghuninya.

Penyerangan ini dilakukan sebagai respon terhadap penembakan membabi buta yang dilakukan oleh dua pilot Belanda tadi. Penyerangan ini dibahah komando Aritonang, Mahmud Khasmir, dan kawan-kawan berhasil menguasai pemancar Radio dan saluran Telepon. Pembagian tugas dibagi menjadi tiga yaitu: pasukan inti akan mengepung asrama polisi di Raba dan menahan semua pejabat Belanda. Sedangkan bagian lain akan menggunakan alat-alat komunikasi yang penting seperti teiepon di Raba dan radio di kamar Bola. Tidak luput pula dibuat pos-pos penjagaan untuk menghadang arang-orang Belanda jika ada yang meloloskan diri. Pos peniagaan tersebut antara lain di buat di Kumbe.

¹⁰ Ahmad Amin, *Ringkasan Sejarah Bima* (Bima: Kantor Kebudayaan Kabupaten Bima, 1971), 9.

¹¹ Ahmad Amin, *Ringkasan Sejarah Bima*, 11.

¹² M. Hilir Ismail, *Perjalanan Kesultanan Bima dalam Perjalananan Sejarah Bima*, 170.

Peristiwa ini menjadi momentum berakhirnya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Bima walaupun ada beberapa orang Belanda yang berhasil meloloskan diri dari penyerangan ini karena secara rahasia terlebih dahulu mereka sudah mengetahui aksi ini akan terjadi. Dalam pertempuran ini kedua orang penerbang Belanda tersebut tewas, sedangkan dipihak rakyat Bima gugur seorang pejuang, Idris Hakim dan satu orang lagi teriuka yaitu Amin Daeng Emo.¹³

Kesultanan Bima berdaulat kembali sebagai kesultanan yang merdeka pada tanggal 5 April 1942, kekuasaan yang sebelum disetir oleh kolonial kemudian berpindah sepenuhnya ke tangan Sultan Muhammad Salahuddin. Kembalinya Bima sebagai suatu daerah yang berdaulat merupakn pukulan keras bagi orang-orang Belanda yang berhasil meloloskan diri ke Lombok Timur. Asiten Residen H.E Haak, Controleur M. Hacman dan lain-lain merancang kembali strategi untuk menyerang Kesultanan Bima. Mereka mengumpulkan kekuatan tentara yang tersisa di Selong Lombok Timur dan Sumbawa. Namun sayangnya penyerangan ini berhasil tercium oleh kurir Kesultanan Bima di Sumbawa. Pada tanggal 12 April 1942 sultan Bima mengetahui berita tersebut dari M. Noor Amin yang pada saat itu menjabat sebagai Jeneli Kempo.

Sultan dengan sigap mengumpulkan kekuatan dan pertahanan untuk mengamankan Bima daerah penyerangan kembali oleh Belanda. Aritonang yang sebelumnya memimpin penyerangan kembali berkolaborasi bersama tentara KNIL dan polisi yang berjiwa nasionalis berkumpul dan berangkat dari istana. Pasukan KNIL, Polisi dan beberapa pemuda laskar Bima tiba di Jembatan Kampaja daerah Dompu sekarang pada tengah malam tanggal 30 April 1942. Ternyata, pasukan Belanda sudah bersiap untuk menyerang maka terjadilah pertempuran sengit pasukan Bima dengan Belanda. Dengan semangat juang mempertahankan tanah air tercinta pasukan Bima berhasil mendesak pasukan Belanda kemudian melumpuhkannya sehingga Belanda kalah. Beberapa pasukan Belanda melarikan diri ke Sumbawa. Satu pasukan Belanda berhasil ditumpas dan satu orang lagi menjadi tawanan. Pertempuran yang terjadi di Sori Utu Dompu ini benar-benar mengakhiri kekuasaan Hindia Belanda di kesultanan Bima.

¹³Tawaluddin Haris, *Kerajaan Tradisional Nusantara Bima* (Jakarta: CV Putra Sejati Raya, 1997), 109.

Situasi Politik Bima Era Pendudukan Jepang

Perlawanan masyarakat Bima melawan Hindia Belanda merupakan momentum kembalinya Kesultanan Bima pada masa dimana menata kembali struktur politik dan pemerintahan yang telah banyak diubah oleh Belanda. Namun ujian lain hadir bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat Bima. Pada tanggal 17 Juli 1942 selang beberapa bulan Belanda berhasil dikalahkan oleh para pejuang Bima Kolonel Saito pemimpin pasukan Jepang tiba di Bima dengan wajah simpatik untuk mengambil hati masyarakat pada saat itu.

Hal ini sejalan dengan slogan 3A yakni Nippon pemimpin Asia, Nippon cahaya Asia dan Nippon pelindung Asia yang digandangkan oleh Jepang sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam upaya melawan sekutu. Gayung bersambut Sultan Muhammad Salahuddin dengan suka cita menyambut kedatangan Jepang ke tanah Bima. Jepang pada pelaksanaan kekuasaannya di tanah Bima bisa dikatakan sangat kejam bahkan lebih kejam dari Belanda. Perlakuan Jepang yang menerapkan kerja rodi serta merampas dengan paksa hasil Bumi untuk dana keperluan perang menyebabkan kemarahan dan rasa kekecewaan masyarakat Bima.

Jepang melalui polisi militernya tega membunuh rakyat yang tidak berdosa. Korban jiwa banyak berjatuh namun pada saat Sultan Salahuddin tidak dapat melakukan tindakan perlawanan karena posisi Jepang yang begitu menguntungkan. Jepang juga merubah sistem sosial, agama, pemerintahan dan politik Bima melalui surat edaran oleh Sultan Muhammad Salahuddin yang berisikan perarutan kepada kepala dari segenap cabang-cabang instansi didalam kerajaan Bima dan Dompu yang dimana waktu atau jam yang dipakai oleh kesultanan Bima yang biasanya menggunakan tahun masehi dan hijriah harus dihapuskan dan disesuaikan dengan waktu Nippon¹⁴. Hari libur kerja hari minggu, harus ditukar dengan hari Jum'at menjadi pada hari Minggu. Kantor -kantor dan sekolah-sekolah harus dibuka¹⁵.

Kebencian masyarakat Bima terhadap Jepang semakin meluap ketika tahun 1943 Jepang bertindak dengan keji yakni menggumpulkan gadis-gadis muda untuk dijadikan

¹⁴Misalnya jam Bima pukul 12.00, maka boleh disamakan dengan jam kerja Nippon pukul 01.00

¹⁵Jikalau ada diantara pegawai-pegawai yang beragama Nasrani, maka pada hari minggu ia boleh pergi ke gereja, tetapi sesudah itu ia harus kembali kerja lagi.

budak dan melayani nafsu bejat tentara Jepang di Asrama militer mereka. Sultan Muhammad Salahaddin sangat geram dengan tindakan Jepang yang sangat tidak bermoral tersebut. Bersama dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan para ulama seperti Idris M Jafar, M. Tayeb, H. Usman Abidin dan Saleh Bakry mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat untuk menikahkan anak gadis mereka dengan sesama muslim. Kebijakan tersebut diterima baik oleh masyarakat Bima sehingga banyak terjadinya nikah massal untuk menjaga harkat dan martabat perempuan Bima.

Pernikahan massal ini terjadi sebagai akibat perlawanan terhadap tindakan Jepang yang tidak bermoral sehingga pernikahan ini juga dalam bahasa Bima disebut sebagai "*Nika Baronta*". Peristiwa ini terjadi pada tahun 1944, dimana rakyat menikahkan secepatnya para gadis dengan laki-laki dari baik dari keluarga dekat maupun jauh. Peristiwa ini cukup mencekam. Dalam sehari, ratusan orang diakad nikahkan. Pernikahan dilakukan sangat sederhana di rumah-rumah warga.

Para Penghulu sangat sibuk naik turun dari satu rumah ke rumah yang lainnya untuk melaksanakan pernikahan. Selain tindakan yang keji Jepang banyak mengubah dan ikut campur dalam menjalankan roda pemerintahan sama halnya yang dilakukan oleh Hindia Belanda. Namun sultan Salahuddin pada saat itu secara diam-diam membentuk badan otonom dari Hadat Kerajaan Bima yang berfungsi mengurus dan mengawasi segala kegiatan dalam bidang keagamaan. Badan ini yang kemudian disebut sebagai "*Badan Syara Kesultanan Bima*".

Kekalahan Jepang dari tentara sekutu setelah di jatuhnya Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 membuat Jepang mengakui kekalahan tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Posisi Jepang dalam Perang Dunia II semakin tersudutkan. Hal ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Hingga secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan yang melalui pidato Ir. Soekarno. Di Bima sendiri masyarakat sangat menyambut baik tentang berita proklamasi bangsa Indonesia. Secara resmi Kesultanan Bima mengakui kedaulatan Indonesia dengan dikirbarkannya sang saka Merah Putih pada tanggal 31 Oktober 1945, bendera ini merupakan bendera yang dibawa oleh Soekarno sendiri ketika berkunjung ke Singaraja Bali dalam rangka pengobaran semangat juang rakyat Indonesia.

Kecintaan Sultan Muhammad Salahuddin terhadap bangsa Indonesia ditandai dengan dikeluarkan maklumat sultan pada tanggal 22 November 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Kami, Sultan Kerajaan Bima, menyatakan dengan sepenuhnya, bahwa :

1. Pemerintahan kerajaan Bima, adalah suatu daerah istimewa dari Negara republic Indonesia dan berdiri dibelakang pemerintah Republik Indonesia
2. Kami menyatakan, bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah pemerintahan kerajaan Bima terletak ditangan kami dan ole karena itu berhubung dengan suasana pada dewasa ini, maka kekuasaan-kekuasaan yang sampai sekarang ini tidak ditangan kami, maka dengan sendirinya kembali ke tangan kami
3. Kami menyatakan dengan sepenuhnya, bahwa perhubungan pemerintahan, dalam lingkungan kerajaan Bima bersifat langsung dengan pusat Negara Republik Indonesia.
4. Kami pemerintahan dan penjaja kepada sekalian penduduk dalam seluruh kerajaan Bima, Mereka akan bersifat sesuai dengan sabda kami yang ternyata diatas.

Kencintaan terhadap Indonesia dan merah putih juga dibuktikann pada saat perundingan dengan NICA di atas kapal Australia di pelabuhan Bima pada tanggal 2 januari 1946. Dihadapan militer Nica dan Moncong Mariam yang siap ditembakkan ke arah kota Bima, Sultan Muhammad Salahuddin tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk tidak mengibarkan bendera merah putih Biru.

Situasi Politik Bima Setelah Proklamsai 1945

Kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih di wilayah Kesultanan Bima pada tanggal 31 Oktober 1945¹⁶. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Kesultanan Bima setelah dikeluarkan maklumat Sultan Salahuddin. Rangkaian penyebaran berita yang berkaitan dengan proklamasi

¹⁶Menurut Nur Wahab, berita proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diterima di Bima pada tanggal 4 September 1945.

kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di seluruh daerah Bima memberikan peluang besar terhadap perubahan politik di Kesultanan Bima. Dalam pelaksanaan lahirnya Negara yang merdeka sesuai UUD 1945 dipandang orang Bima sebagai jaminan terhadap pelaksanaan hukum Islam. Pernyataan tersebut yang menjadi faktor pendorong bagi masyarakat Bima dan beserta petinggi Kesultanan untuk mengerahkan kekuatan dalam mempertahankan proklamasi.

Sebelum proklamasi di Bima dibentuk wadah perjuangan kemerdekaan seperti IPB dan Persatuan Guru Bima (PGB), yang beranggotakan para guru Darul Tarbiyah, Darul Ulum dan Sekolah Menengah Pertama pulau Sumbawa. Untuk memperluas cakupan gerakan mempertahankan kemerdekaan, PGB dilebur dan digabungkan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan akhirnya pada bulan Desember 1945 resmi berdiri PGRI cabang Bima¹⁷, dan sebelum itu telah dulu dibentuk organisasi Angkatan Pemuda Indonesia pada bulan September 1945¹⁸.

Kehidupan politik pada tahun 1945 yang masih menfokuskan kepada berita penyebaran Proklamasi kemerdekaan dan gerakan persiapan untuk mempertahankan kemerdekaan, mendorong orang Bima yang tergabung dalam wadah PGRI, API, SI, PERPI, PIB, NU dan IQAM lebih memperhatikan bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia jika sewaktu-waktu diganggu oleh pihak penjajah. Peristiwa datangnya tentara sekutu yang diwadahi oleh NICA di Bima tanggal 12 Januari 1946 memunculkan bertambahnya kegiatan politik.

Muncul berbagai gerakan perlawanan terhadap NICA dalam menjamin dan mempertahankan keutuhan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di Bima sendiri tokoh-tokoh masyarakat seperti Muhammad Saleh Bakry, Haji Usman dll memunculkan gerakan dalam lahirnya NIT. Pada tanggal 23 Maret 1948 mereka berhasil mendirikan partai politik yang disebut Partai Ikatan Qaum Muslimin (IQAM) dan hal ini didukung penuh oleh pemerintah Kesultanan Bima.

¹⁷IKIP Bima, *Sejarah Perjuangan Rakyat Bima*, 105. Menurut sumber tersebut pengurus PGRI Cabang Bima yaitu H. Usman Abidin sebagai ketua, Idris M. Jafar sebagai wakil ketua dan M. Saleh Bakry sebagai sekertaris.

¹⁸IKIP Bima, *Sejarah Perjuangan Rakyat Bima*, 105. Menurut sumber itu API pertama kali di pimpin oleh M. Tayeb Abdullah dan Abu Bakar. Setelah terbentuknya IQAM di Bima pada tanggal 23 Maret 1984 API melebur bersama IQAM.

Ekonomi Bima pada masa Sultan Salahuddin

Kegiatan perekonomian orang Bima pada masa kesultanan Muhammad Salahuddin berlangsung didominasi oleh kegiatan agraria. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Bima yang merupakan salah satu wilayah yang cukup subur dengan curah hujan yang cukup di daerah pulau Sumbawa. Hasil bumi yang biasanya dihasilkan oleh masyarakat Bima berupa Padi, Jagung, Kedelai, dan Bawang Merah. Hasil bumi ini tidak hanya diperdagangkan hanya di dalam daerah kesultanan saja namun juga di kirim ke luar daerah. pertanian menurut orang Bima adalah hak untuk memperoleh sawah atau areal pertanian baru, dan hak untuk memperoleh hasil-hasil pertanian.

Mengenai hak pembagian hak atas hasil-hasil pertanian seperti yang diajarkan hukumnya dalam lembaga pengajian itu perlu kiranya dipersoalkan disini karena erat kaitannya dengan hukum pertanian dan hukum Islam. Bahwa hak atas hasil pertanian menurut orang Bima adalah hak untuk memperoleh sawah atau areal pertanian baru, dan hak untuk memperoleh hasil-hasil pertanian. Mengenai hak yang pertama, tradisi Orang Bima khususnya yang tinggal di desa-desa, harus membuka hutan untuk pertanian dan mendapatkan daerah persawahan. Apabila persawahan baru telah diperolehnya, maka pada tahap pertama, petani yang bersangkutan harus menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada Sultan. Tanah atau sawah-sawah yang diserahkan kepada Sultan itu bukanlah menjadi hak Sultan¹⁹, akan tetapi dipergunakan untuk "*danamolu kai*"²⁰.

Pada tahap kedua, para petani menyerahkan lagi 2.5% dari tiap hasil panen sawahnya kepada sultan melalui *Lebe na'e* atau *Cepelebe* yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyerahan 2.5% tersebut mencakup kewajiban zakat untuk tahun yang berjalan dan penyerahan hak Sultan. Menurut orang Bima, penyerahan sebagian hasil garapannya dalam membuka sawah baru itu dilakukan oleh karena dalam tindakan itu ada dua keinginan yakni untuk menunjukkan ketaatan kepada pemerintah Sultan dan bahwa tindakan itu berkaitan dengan ibadah dalam perayaan hari kelahiran nabi

¹⁹Penyerahan 2.5% hasil panen padi sebagai bahan makanan pokok dilaksanakan setahun sekali dalam satu tahun. Sedangkan 2.5% hasil panen tanaman selain padi seperti pisang, kelapa, asam, bawang dll diserahkan kepada Sultan setiap panennya diantar langsung ke Istana. Tindakan tersebut selalu diidentikan dengan "*ngee ada*" atau tinggal budak, yakni suatu tindakan penyerahan hak Sultan sebesar 2.5% hasil panen, hal ini sesuai jumlah zakat yang diterapkan dalam islam sebesar 2.5%.

²⁰Tanah yang digunakan sebagai sumber biaya perayaan hari maulid Nabi Muhammad.

Muhammad. Perbuatan dan sikap yang demikian itu tidak ada sentuhan apapun dengan perbuatan hukum atas tanah dan hutang-piutang.

“*Dana molu kai*” adalah lembaga keuangan istana yang memangku tugas menyediakan sumber biaya bagi kegiatan hari-hari besar dalam lingkungan istana yang sering disebut dengan “*rawi ma tolu kali sa mba’a*” (peristiwa besar yang dirayakan tiga kali dalam satu tahun). Ketiga peristiwa yang diadakan secara besar-besaran dalam upacara resmi istana ialah (1) perayaan Siri Puan²¹, (2) hari raya Idul Fitri dan (3) hari raya Idul Adha (hari raya Qurban). Pada upacara ketiga peristiwa besar itu dihadiri oleh seluruh pembesar istana, pembesar daerah kerajaan dan rakyat dari seluruh pelosok daerah Bima. Walaupun “*dana molu kai*” itu mengemban tugas membiayai ketiga peristiwa besar tersebut, namun “*dana molu kai*” masih menyediakan kemungkinan untuk digunakan sebagai biaya dan pengganti gaji para pemangku jabatan di istana.

Seluruh hasil panen, dipandang orang Bima atau petani desa sebagai bukan milik secara individual, akan tetapi pada hasil pertanian itu melekat hak-hak pihak lain, seperti yang tecermin dalam ungkapan orang Bima “*ese na mangemo, woha na lampa, awa na ma rama, na siri mena ku ndi ntandi ra ntendi ede*”. Ungkapan itu bermakna bahwa segala binatang yang terbang, siapa dan apa pun yang berjalan, dan segala binatang yang meraya atau melata, masing-masing mempunyai hak atas segala macam produksi pertanian.

Atas dasar itulah maka persembahan hasil pertanian kepada sultan melalui lembaga “*nge’e ada*” adalah kesadaran atas kewajiban mereka untuk memberikan hak orang lain yang melekat pada hak individualnya. Di pihak istana, penyerahan semacam itu bukanlah tindakan seperti yang dimaksud oleh prinsip dari ungkapan tersebut di atas, akan tetapi di pandang sebagai pembayaran salah satu jenis pajak rakyat. Karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga “*ngge’e ada*” (tinggal Budak) menurut pihak istana adalah penyerahan hasil pertanian yang dikerjakan oleh budak-budak atas tanah milik kerajaan.

²¹Menurut sumber Ahmad Amin, *Sejarah Bima*. Hal.53-55. Perayaan Sirih Puan dimulai sejak Sultan Sirajuddin memimpin (1646-1682). Sejak itu ditetapkan sebagai Hari Besar Nasional Kerjaan Bima. Upacara tersebut dilakukan atas dasar keprihatinan Sultan terhadap kondisi masyarakat Bima yang semakin berkembangnya tindakan maksiat seperti judi, alcohol, pencurian dll. Upacara tersebut dimulai tanggal 6 Rabiul Awal.

Dalam pada itu prinsip menurut istana itu tidak dapat dijadikan pegangan, karena ada kecenderungan masyarakat Bima menganut prinsip bahwa tanah atau hutan beserta isinya diseluruh daerah kerajaan Bima adalah tanah milik kerajaan, dan rakyat kerajaan diperkenankan untuk membuka/mengolahnya untuk keperluan hidup mereka. Demikian pula tidak di anut system tanah “mardika” atau “tanah tidak dikenal” seperti yang dimaksud oleh lembaga Negara Hindia Belanda Nomor: 207 tahun 1913 yang menyatakan bahwa tanah rakyat dapat dirampas untuk tanah negara kemudian dikembalikan kepada rakyat untuk di olah dengan kewajiban membayar atau bagi hasil kepada pemerintah²². Sistem hak atas tanah tersebut di atas mengalami perubahan akibat pergeseran sistem pemerintahan kesultanan ke sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957. Walaupun demikian komponen agama dalam sistim hukum tanah yang dilaksanakan pada masa pemerintahan kesultanan masih akrab dengan kehidupan bercocok tanam orang Bima.

Berdasarkan sumber yang didapat adapun hasil bumi yang ada di keultanan Bima pada pemerintahan Sultan Muhammad Salahaddin cukup beragam, bahkan pemerintah kesultanan mengeluarkan peraturan yang cukup ketat dalam berlangsungnya ketersediaan pangan di wilayah Bima. Hal ini sesuai dengan laporan hasil pertanian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kesultanan Bima dibawah kepemimpinan Sultan Salahuddin adapun mengelurakan hasil laporan berapa jumlah hasil-hasil dari berbagai wilayah di Kesultanan Bima. Produk-produk pertanian unggulan masyarakat Bima pada saat itu diantaranya:

1. Padi dengan luas lahan sekitar 22765,7 ha dengan jumlah tanah tegal atau sawah 12743,77 dan ladang kurang lebih 8000 ha hasil Padi di kerajaan secara keseluruhan 55.000 ton sampai 60.000 ton padi kering pertahun dan 27.500 ton sampai 30.000 ton beras setahun yaitu hasil sawah dan ladang. Wilayah yang banyak menghasilkan padi yaitu Bolo, Belo, Sape, Woha, Wawo, Rasanae, Monta dan Wera.
2. Jagung dengan luas tanah yang digunakan di perswahan \pm 4000 km dan di tengah ladang \pm 1000 ha wilayah yang banyak menghasilkan jagung yaitu kejenelian Rasana'e, Belo, Bolo, Monta, dan Woha. Hasil dari kerajaan secara kesuluruhan \pm 10.000 ton sampai 12.000 jagung biji setahun.

²² J. Van Gelden, *Tanah dan Penduduk di Indonesia* (Jakarta: LIPI, 1999), 85.

3. Tembakau berbeda dengan Jagung dan Padi keberadaan lahan tembakau di wilayah Bima pada masa kesultanan kurang diminati oleh masyarakat. Di kerajaan Bima hanya sedikit saja terdapat tanaman tembakau dan tanamanpunkecil-kecil dan dipinggir-pinggir sungai pada tanah tegalan atau tanah sawah dan kebanyakan ditanah tegalan yang rata atau tanah yang miring sedikit umumnya dipilih tanah yang berpasir atau tanah gambur. Supaya gampang disiramnya dan tanahnya berpasir dan sering banjir oleh karena itu ada agak gemuk. luas tanah sawah ± 10 ha dan luas ditegalan pinggir kali $\pm 70-90$ ha.
4. Kopi, penduduk kerajaan Bima tidak menanam kopi. Dalam Kerajaan Bima terdapat kebun kopi hanya di Tambora satu ondernemingdahulu kepunyaan orang Swedia yang bernama Tambora Estate. Luasnya ± 400 ha yng ditanam dengan kopi Robusta.
5. Kelapa, kebun-kebun kelapa kerajaan Bima hanya sedikit saja didapatnya pada kebun dekat laut, sebagian di Sape, Kempo, Labuan Bajo, Kenanga, Hu'u dan Karumbu, dibagian tengahdan diperkampungan jarang kedapatan kebun kelapa. Hasil kelapa tersebut untuk keperluan sehari-hari buat penduduk dalam kerajaan belum mencukupi oleh sebab itu tiap-tiap tahunnya banyak buah kelapa didatangkan dari pulau-pulau lain.
6. Bawang, luas perusahaan sawah dalam tiap tahun rata-rata $\pm 300-900$ ha. Bawang banyak diproduksi dibagian Kejenelian Monta, Belo, Bolo, Woha, Dompu dan Sape sesudahnya Padi, ada pula sebagian kecil dari sawah di Kejenelian Sape dan Monta yang semata-mata dipergunakan untuk pertanian Bawang pada sawah tersebut bawang ditanam 2 kali setahun yaitu sesudah musim barat atau pada musim timur. Hasilrata-rata dalam setahun ± 900 Ton sampai 10000 Ton Bawang.
7. Kacang Hijau, luas perusahaan di sawah ± 8000 ha. Ditegalan/Ladang ± 70000 ha. Jumlah 15000 yang terbanyak yang diusahakan yaitu dibagian Kejenelian Bolo, Dompu, Belo, Rasanae, Sape, Woha, Wera dan Monta.

Untuk menjaga keberlangsungan pertanian di wilayah Kesultanan Bima.Sultan Muhammad Salahuddin menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu. Pemerintah Kesultanan mengeluarkan Undang-Undang untuk menjaga keamanan dalam bidang pertanian yang mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 1943 yang memuat peraturan

untuk mengatur keberlangsungan pertanian di wilayah Bima²³. Masyarakat Bima secara turun-temurun memiliki tradisi yang cukup unik dalam hal penyimpanan hasil panen setiap musim panen berlangsung.

Selain didominasi pada kegiatan pertanian masyarakat Bima juga menjalankan roda perekonomian pada sektor peternakan. Hal ini didukung oleh peraturan-peraturan kesultanan yang memerintah para Jeneli-jenelinya untuk ketersediaan hewan ternak baik untuk kebutuhan perdagangan maupun kebutuhan yang berkaitan dengan hari besar keagamaan contohnya pada saat Idul Qurban berlangsung. Pada dasarnya kegiatan pertanian dan peternakan masyarakat Bima memiliki keterkaitan yang sangat erat. Secara tegas pemerintah Kesultanan Bima mengeluarkan peraturan No. 19/VIII-a tentang peternakan Kerbau, Kambing dan Kuda yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kerbau: jumlah kerbau di wilayah Kesultanan Bima cukup banyak. Akan tetapi, dari jumlah yang sekian besarnya itu hanya sedikit saja yang terpelihara dengan baik, sebagian besar dari kerbau-kerbau disini telah dilepaskan begitu saja hingga sering kali menimbulkan gangguan terutama bagian pertanian. Untuk menjaga keadaan yang demikian, maka kami harap agar supaya diadakan aturan untuk pemeliharaan kerbau.
2. Kuda: untuk memperbaiki peternakan kuda maka akan diadakan pemilihan kuda jantan yang memenuhi syarat-syaratnya untuk dijadikan kuda pemancet (*rahi*). Kuda ini harus didaftarkan (masing-masing Guntyo mempunyai daftar sendiri) dan diberikancap. Kuda-kuda yang telah ditunjuk menjadi pemancet tidak diperkenankan dijual kepada orang lain, melainkan pada sesama pendudukpun hanya untuk peternakan saja.
3. Kambing: jumlah Kambing Etawa di Bima amat kecil memenuhi semua permintaan bibit untuk memperbesar tubuhnya kambing asli disini sedang pengharapan untuk mendatangkan Etawa yang tulen mungkin belum ada. Maka

²³Peraturan di antaranya memuat tentang Pagar tetap (*kuta mori*) harus memakai kayu-kayu yang hidup atau kayu keras (*tera haju*). Jaraknya tidak lebih dari empat sentimetre udah itu harus memakai kayu duri (*ciri*) yang rapat, serta memakai galak (kambal) sekurang-kurang susun tiga (*sandundu tolu*). Pagar sementara ada tanaman (*kuta made*). Selain itu peraturan juga memuat tentang segala binatang ternak harus diikat, atau dijaga oleh yang punya, akan tetapi didalam kerajaan Bima, sebagian besar binatang-binatang ternak masih dilepaskan sendiri digunung atau didaratan

perlulah mengadakan persediaan sendiri. Lebih lanjut pemerintah Kesultanan Bima mengeluarkan peraturan tentang

Peraturan tentang pemeliharaan kerbau yang terdiri dari 14 pasal yang kebanyakan berisikan tentang kerbau-kerbau di wilayah Bima harus diberi cap “S” pada leher sebelah kiri agar memudahkan dalam mengenali siapa pemilik kerbau tersebut. Selain itu pada pasal 8 diterapkan sistem pajak dimana kerbau-kerbau yang telah didaftarkan dikenakan pajak sebanyak/sejumlah/0.30 (tiga puluh sen) seekor untuk satu tahun Apabila kerbau ini disembelih dan seekorkerbau harus membayar pajak sejumlah Satu Rupiah jika kerbau ditangkap hidup sebesar Tiga Rupiah jika kerbau ditangkap mati.

Pada pasal 12 berbunyi Pasal 12: Pada waktu melepas kerbau-kerbau ditempat gembala harus ada yang Menjagnya agar tidak mengganggu kegiatan pertanian. Dan pada pasal 13 ditegaskan lagi bahwa barang siapa yang melanggar aturan tersebut diatas ini maka kerbauakandibeslag (rampas).

Sosial Budaya dan Keagamaan pada masa Sultan Salahuddin

Pergaulan kemasyarakatan Bima tidak dapat dipisahkan dengan refleksi ajaran agama Islam. Aktivitas kemasyarakatan orang Bima erat sekali kaitannya dengan sistim nilai agama, apakah suatu tindakan haram atau halal, Islam atau Kafir termasuk dalam hal berpakaian. Pakaian kalangan wanita baligh ketika berada di luar lingkungan rumah tangga berbeda dengan saat berada dalam lingkungan rumah tangga. Apabila mereka keluar rumah untuk tujuan apaun harus berpakaian “rimpu”²⁴, atau sistem busana yang dikaitkan dengan aturan menutup aurat atau serba tertutup kecuali kedua belah mata dan dua telapak kaki. Apabila pakaian wanita “baligh” dalam rumah dapat menampakkan sebagai anggota auratnya seperti kepala hingga leher, dua kaki hingga pertengahan betis dapat dipandang sebagai pakaian “kafir”.

Sebagaimana yang terjadi didaerah lain pengajaran Al-Qur’an di Bima berupaya menanamkan kemampuan membaca Al-Qur’an dimulai sejak umur lima tahun, dan pada umur sepuluh tahun sudah harus “tama ngaji” seperti yang telah di bahas dalam bagian

²⁴ Rimpu merupakan cara orang Bima dalam menaati perintah agama untuk menutup aurat pada waktu itu masyarakat belum mengenal kerudung modern seperti sekarang. Maka dari itu, masyarakat Bima khususnya yang perempuan menggunakan sarung tenun sebagai pengganti kerudung untuk menutup aurat. Rimpu sendiri memiliki banyak jenis dan tata cara pemakaian diklasifikasikan dari apakah perempuan tersebut sudah menikah atau belum cara atau style pemakaiannya pun berbeda.

terdahulu. Kemampuan membaca Al-Qur'an sering di jadikan ukuran bagi pergaulan antar pemuda. Sebaliknya dapat terjadi perbenturan dikalangan mereka hanya disebabkan oleh saling menyalahkan dalam tata carapembacaan Al-Qur'an di tempat pengajian. Demikian pula bila terjadi suatu rencana perkawinan yang sudah sampai pada tingkat penenrtuan lamaran untuk di terima, maka syarat yang diajukan oleh pihak calon istri ialah antara lain kemampuan calon suami membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Tradisi itu lebih dikembangkan lagi oleh masyarakat di desa ngali kecamatan Belo bahwa sebelum aqad nikah dilakukan, calon suami diuji oleh masyarakat dan khalayak setempat dengan memberikan ujian kepada calon suami untuk menjadi imam solat magrib.²⁵

Pendidikan pada masa Sultan Salahuddin

Kehidupan orang Bima dan kelembagaan pendidikannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pengislaman. Sejak tahap-tahap permulaaan pengIslaman Bima hingga keabad ke-19. Pendidikan non-formal adalah satu-satunya bentuk kelembagaan pendidikan orang Bima. Pengajaran agama dilakukan dilingkungan rumah tangga, masjid, langgar surau atau mushollah. Penanggungjawab lembaga pendidikan itu dan pengajarannya adalah para muballik atau penyebar Islam. Bentuk-bentuk kelembagan itu dilanjutkan oleh para penyebar Islam berikutnya seperti Datuk Raja Lelo (cucu Datuk Ri Bandang) bersama ayahnya Datuk Sri Nara Biraja, Datuk Iskandar, Datuk Selangan Koto, Datuk Panjang²⁶. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Syekh Umar Al Bantan, seorang keturunan Arab dari Banten serta H.M Sidiq, H. Abdul Rasyid, H. Abdullah, H. Abdul Gani, H. Idris, H. Hasan Betawi dan Syekh Abdul Wahab As-Syafi'i dari Masjidil Haram.

Pendidikan dan perjuangan pengajaran yang diberikan dalam masjid atau Langgar, di istana pada tiap malam Jum'at khusus bagi keluarga istana, dakwah di desa-desa, telah memberikan bentuk-bentuk dasar bagi lahirnya sistem pendidikan formal di Bima. Sebelum masa kemerdekaan, lembaga pendidikan formal diselenggarakan oleh pemerintan penjajahan dan lembaga keagamaan Islam. Pada tahun 1918 didirikan *Vervolg School* oleh pemerintah kolonial Belanda yang selanjutnya di tingkatkan menjadi

²⁵Biasanya upacara aqad nikah di desa itu dilakukan sesudah shalat magrib. Oleh karena itu calon suami harus berada di rumah di mana dilaksanakan aqad nikah sebelum shalat magrib. Tradisi itu hanya terjadi jika calon suami tersebut berasal dari luar Desa Ngali.

²⁶ Departemen Pendidikan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan di Nusa Tenggara Barat (Mataram: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Inventaris dan Dokumen Kebudayaan Saerah, 1980/1981), 33.

Normal Cursus yang pada akhirnya di ubah menjadi *Cursus Volks Onderwijzer* (CVO) pada tahun 1937. CVO itu diubah pula sehingga menjadi *Ovleiding Volks Onderwijzer* (OVO) pada tahun 1948. Sebagai lanjutan dari OVO didirikan *Hollandas Inlandsche School* (HIS).

Pada tahun 1949 Lembaga pendidikan tersebut hanya menampung murid-murid dalam jumlah terbatas dan hanya dapat disentuh orang Bima dari kalangan tertentu.²⁷ Sistem pendidikan tradisional yang berpusat di masjid dan langgar yang berazaskan Islam tetap dipertahankan, tetapi sistem pendidikan modern melalui lembaga pendidikan (sekolah) harus segera dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian system budaya (adat istiadat) yang Islami, sebagai jati diri masyarakat Bima yang dikagumi oleh semua pihak sepanjang sejarah.

Pada tahun 1921, Sultan Muhammad Salahuddin mulai mencanangkan sistem pendidikan modern dengan mendirikan HIS di kota Raba. Pada tahun 1922, mendirikan “Sekolah Kejuruan Wanita” (*Kopschool*) di Raba. Untuk memimpin sekolah itu, Sultan Salahuddin mendatangkan seorang guru keturunan Indonesia yang berjiwa nasionalis Sulawesi Selatan bernama SBS Yulianche. Guna pemerataan pendidikan, pada tahun 1922 Sultan Muhammad Salahuddin mendirikan sekolah agama dan umum di seluruh kejenelian (Kecamatan). Mulai saat itu di desa-desa tertentu didirikan sekolah agama setingkat Ibtidaiyah yang bernama “Sekolah Kita” (Sekolah Kitab) dan sekolah umum yang bernama “Sekolah Desa” yang kemudian berkembang menjadi “Sekolah Rakyat” yang setingkat dengan Sekolah dasar (SD) pada masa sekarang.

Pada tahun 1931, Ruma Bicara (Perdana Menteri) Abdul Hamid bersama Abdul Wahid Karim tokoh muda Muhammadiyah kelahiran Sumatra barat, mendirikan “Madrasyah Darul Tarbiyah” di kota Raba. Keberadaan sekolah ini disambut positif oleh Sultan Muhammad Salahuddin dengan memberi bantuan berupa dana serta sarana pendidikan. Pada tahun 1934, Sultan bersama Ulama dari Batavia bernama Syekh Husain Saychab Mendirikan “Madrrasah Darul Ulum” dikampung Suntu Bima. Dua lembaga pendidikan Islam ini, berhasil mencetak kader Islam yang kelak menjadi tokoh-tokoh yang berani baik pada masa pergerakan maupun pada era revolusi kemerdekaan.

²⁷Tiga Tahun IKIP Bima, *Sejarah Perjuangan Rakyat Bima* (Bima: Dema IKIP Bima, 1973).54

Pada tahun 1931, pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah agama serta rumah ibadah (Masjid dan Langgar) oleh Sultan diserahkan kepada “Lembaga Syara Hukum”. Lembaga yang sebelum tahun 1908 merupakan lembaga resmi pemerintah kesultanan yang bernama “Lembaga Syarah Hukum”. Pada tanggal 16 Maret 1968 lembaga ini berubah statusnya menjadi “Yayasan Islam Bima”. Sumber Dana Berasal dari “*Dana Molu*” (Sawah Maulud) sebanyak 200 Ha.²⁸

Pada awal pelaksanaan sistem pendidikan modern, Sultan Muhammad Salahuddin mengalami banyak kendala. Masyarakat yang terkenal taat pada agama, curiga dengan sistem pendidikan yang berasal dari orang Belanda yang dianggap “*Dou Kafi*” (Orang Kafir). Untuk mengantisipasi kecurigaan masyarakat, Sultan Muhammad Salahuddin berusaha mendatangkan guru-guru yang beragama Islam dan berjiwa nasionalis dari berbagai daerah diluar Bima²⁹, antara lain dari Makassar dan Jawa. Guru-guru non muslim tetap berjiwa nasionalisme diusahakan untuk mengajar disekolah-sekolah umum. Akhirnya kehadiran guru-guru tersebut disambut baik oleh masyarakat. Semangat persatuan yang tidak dibatasi oleh suku dan agama mulai terjalin. Hal ini merupakan pertanda Tumbuhnya semangat kebangsaan di Bima.³⁰ Guru-guru yang didatangkan dari luar daerah, antara lain Muhammad Said akhirnya menikah dengan gadis Ngali Bima dan memperoleh anak antara lain Prof. Dr. Muh. Natsir Said.

Salah satu kebijakan sultan Muhammad Salahuddin yang patut kita hargai ialah memberikan Beasiswa kepada pelajar yang berprestasi untuk belajar di Makassar dan kota-kota besar di Jawa, bahkan ada yang dikirim ke Timur Tengah³¹. Pelajar yang diberi beasiswa benar-benar berdasarkan prestasi dengan tidak mempertimbangkan status sosial dan jenis kelamin. Setelah kembali di Bima mereka tampil sebagai pemimpin dan tokoh perjuangan pada masa revolusi kemerdekaan.

Sekolah atau lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan Islam dalam kategori pendidikan formal mulai didirikan di Bima pada tahun 1931, yakni pada saat didirikan Darul Tarbiyah. Darul Tarbiyah itu dimaksudkan sebagai protes

²⁹Stensilan Panitia Sejarah Rakyat Bima, *Laporan Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Bima 1908-1950* (Bima: Seminar Sejarah Bima, 1980), 34.

³⁰ M. Hilir Islami, 89.

³¹ M. Hilir Ismail, 110.

terhadap diskriminasi murid pada sekolah Belanda, dan sebagai lanjutan lembaga pendidikan non formal yang telah berkembang di Bima sejak awal penyebaran Islam.

Pada tahun 1935 didirikan madrasah PIB, dan Madrasah Muhammadiyah didirikan pula pada tahun 1938. Setelah Indonesia merdeka, seluruh lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan Islam diperintahkan oleh Sultan Bima untuk diserahkan kepada badan Hukum Syara Bima. Atas dasar itu Badan Hukum Syara' mengembangkan lembaga pendidikan Agama Islam itu tidak hanya di kota, akan tetapi di setiap desa. Pada setiap desa didirikan Madrasah Darul Ulum dengan mata pelajaran yang tidak berbeda dengan lembaga pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Para pengajar di Lembaga pendidikan itu terdiri dari para Tuan Guru yang pernah bermukim bertahun-tahun di Mekkah dan juga orang-orang Bima lulus Darul Tarbiyah. Para mukimin di mekkah itu di pulangkan ke Bima atas perintah dan biaya Sultan Bima.³²

Selain Darul Ulum, juga terdapat Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, pendidikan Guru yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Syara, Murid Sekolah Umum Seperti SD, SMP, dan SMA yang didirikan pada sekitar tahun 1950-an, masih diharuskan oleh orang tua mereka untuk belajar agama Islam pada madrasah-madrasah tadi. Selain pendidikan formal, masih terdapat lembaga pendidikan non-formal yang ikut memberi warna agama Islam dalam kehidupan orang Bima. Lembaga pendidikan non-formal itu mengajarkan agama Islam yang diselenggarakan pada tiap rumah tangga terdapat lembaga "ngaji karo'a" (mengaji Al- Qur'an) yang mendidik anak umur sekolah mengaji Al- Qur'an yang diajarkan oleh "guru ngaji" secara sukarela. Murid yang mengikuti "ngaji karo'a" adalah anak-anak yang berumur antara 5-6 tahun, dan selama tiga tahun anak tersebut harus menyelesaikan pembacaan Al-Qur'an 30 juz. Puncak pendidikan agama pada lembaga "ngaji karo'a" itu ialah "khara karo'a" (khataman Al-Qur'an atau tamat mengaji) yang dibarengi dengan acara khitanan bagi anak yang bersangkutan.

Selain lembaga pendidikan "ngaji karo'a" dalam lingkungan rumah tangga, terdapat pula lembaga pengajian Al-Qur'an dari rumah ke rumah, masjid dan langgar. Pengajian itu hanya menitik beratkan pelajarannya pada hukum Islam dan tasawuf. Pendidikan yang terakhir inilah yang mengajarkan secara langsung sistem Zakat

³² Rudjiati Mulyadi, *Bandar Bima*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. 67.

dalam Islam, sistem pembagian hak atas hasil-hasil pertanian sepanjang kaitannya dengan kegiatan ibadah dan upacara agama.

Penutup

Bima sebagai sebuah kerajaan memiliki peranan penting dalam panggung sejarah di wilayah Indonesia bagian timur khususnya di wilayah Nusa Tenggara. Tampilnya Bima sebagai wilayah kesatuan pemerintahan yang berlandaskan Islam tidak terlepas dari perjalanan sejarah panjang dan berliku. Bima yang salah satu pusat perdagangan bebas sekaligus penyambung antara wilayah Indonesia bagian tengah ke Indonesia bagian timur menghadapi banyak rintangan baik yang datang dari internal dan eksternal kerajaan.

Kemelut politik di kerajaan Bima memberikan peluang berdirinya kesultanan Bima, 5 Juli 1640 menjadi momentum penting perjalanan daerah Bima yang menandai perubahan dalam system pemerintahan, politik, dan agama bagi masyarakat Bima hingga berakhirnya kesultanan pada tahun 1951 pasca wafatnya sultan Muhammad Salahudin.

Lebih dari tiga abad kesultanan Bima memainkan peranan penting dalam peraturan sejarah dan budaya nusantara, bahkan dunia. Silih berganti para sultan, Rumah bicara, dan para ulama bahu membahu dengan rakyat membangun sendi-sendi kehidupan yang kental dengan nuansa Islam. Lebih dari tiga abad pula mereka berjuang dengan cucuran darah dan derai air mata melawan para penjajah. Patah tumbuh hilang berganti, konsistensi perjuangan tetap ditunjukkan demi persada pertiwi dan rakyat. Kecemerlangan itu berakhir di masa api proklamasi terus membahana di Persada ibu pertiwi.

Keberadaan Bima di dalam mata rantai pelayaran dan perdagangan di Nusantara tidak terlepas dari letak kepulauan Sunda Kecil secara keseluruhan. Kepulauan ini dengan persediaan air minum yang baik kualitasnya dan makanan yang dimilikinya dapat melayani pedagang-pedagang Melayu dan Jawa dan sekaligus tempat beristirahat dalam jalur pelayaran dari barat ke timur. Di sini mereka menukarkan pakaian yang mereka bawa dari Malaka dan Jawa dengan rempah-rempah. Sedangkan Bima memasok kayu celup (dye-wood) untuk pedagang Malaka yang kemudian di ekspor ke Cina. Boleh jadi karena pentingnya Bima, nama Bima lebih sering digunakan oleh orang Portugis dan Belanda untuk menyebut keseluruhan pulau Sumbawa.

Padahal di Sumbawa terdapat kerajaan lain yakni Dompu, Sanggar, Tambora, Pekat dan Sumbawa. Ditinjau dari perkembangannya, kerajaan Bima tentu saja harus diletakkan di dalam kerangka hubungannya dengan kerajaan-kerajaan lain di Sumbawa dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, khususnya Gowa di Sulawesi Selatan. Di samping itu menarik juga untuk menggambarkan interaksi kerajaan Bima dengan orang Eropa yang dalam perkembangannya kemudian masuknya wilayah Bima dalam wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Salahuddin, Kesultanan Bima banyak menghadapi berbagai perlawanan terhadap penjajah yakni Belanda dan Jepang. Kehidupan masyarakat Bima banyak dipengaruhi oleh Islam sebagai agama resmi yang diakui oleh pemerintah kesultanan. Hal ini tercermin dari implementasi kehidupan sehari-hari masyarakat Bima masa Sultan Salahuddin lebih mengedepankan nuansa Islami. Kehidupan politik pemerintahan yang banyak dipengaruhi oleh masuknya Belanda dan Jepang, tidak membuat Bima kehilangan marwah sebagai sebuah wilayah yang berkuasa secara independen. Kesultanan Bima harus bergabung dengan NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad. 1971. *Sejarah Bima*. Bima: Kantor Kebudayaan Kabupaten Bima.
- Azis, A Rajak. 1967. *Rangkaian Peristiwa Kerajaan Sanggar 1667-1928*. Bima: Pemerintah Kabupaten Bima.
- Azis, A Rajak. 1990. *Rangkaian Peristiwa di Kerajaan Sanggar*. Bima: Pemerintah Kabupaten Bima.
- Daeng Paruntru, Abdul Rajak. 1983. *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Departemen Pendidikan Kebudayaan. 1980/1981. *Sejarah Pendidikan di Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Inventaris dan Dokumen Kebudayaan Daerah.
- Depdikbur Republik Indonesia. 1979. *Sejarah Perlawanan Terhadap Belanda*. Jakarta: Proyek Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Gani Abdullah, Abdul. 2005. *Badan Hukum Syara Kesultanan Bima*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Gani Abdullah, Abdul. 2015. *Bima Dalam Lintasan Sejarah*. Bima: Genta Publishing.
- Haris, Tawaluddin. 2004. *Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima*. Jakarta: Gramedia.

- Ibrahim Jindan, Khalid. 1994. *Teori Pemerintahan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail, M Hilir. 1988. *Peran Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*. Mataram: Lenge bekerja sama dengan Adikaryan IKAPI Ford Foundation.
- Ismail, M. Hilir. 2014. *Raja dan Sultan Bima*. Bima: Pemerintah Kabupaten Bima.
- L Masir, Abdullah. 1982. Bo "Suatu Himpunan Catatan Kuno Saerah Bima". Mataram: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
- Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*. 1977. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Tajib, Abdullah. 1999. *Sejarah Dana Mbojo*. Jakarta: Harapan Massa.
- Tiga Tahun IKIP Bima, 1973. *Sejarah Perjuanga Rakyat Bima*. Bima: Dema IKIP Bima.
- Effendy, Muslimin A.R. 2017. *Diskursus Islam dan Karakter Politik Negara di Kesultanan Bima*. Jurnal Al- Qalam Vol 23 No 2 Desember 2017. (Makassar: Litbang Agama), ISSN: 0854-1221, E. ISSN: 2443- 2288, hlm. 184197..
- Wirawan, Wahyu. 2011. *Semaun Dalam Bayang-bayang Pemerintah Hindia Belanda 1819- 1823*. Jurnal. Belanda: Nijmegen University Belanda. Volume 21 nomor 2 Juli 2011.